

## BAB V

### PENUTUP

#### V.1 Kesimpulan

Indeks Demokrasi Indonesia dirancang untuk mengetahui dan menilai secara reguler apakah kondisi demokrasi Indonesia bergerak menuju negara demokrasi atau justru sebaliknya. Pengukuran tersebut bersumber dari nilai demokrasi yang didapat pada tingkat provinsi di Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2020 mengalami kenaikan. Indeks Demokrasi Indonesia dinilai dari tiga indikator utama, yaitu: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Skor Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 sebesar 84,73; pada tahun 2018 skor Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta menjadi 85,08; pada tahun 2019 skor Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta menjadi 88,29; dan pada tahun 2020 skor Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta menjadi 89,21. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan peringkat tertinggi pada tahun 2017-2020. Aksi buruh berdampak kecil terhadap penilaian dalam indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta, karena Penilaian dalam indikator Indeks Demokrasi Indonesia tidak hanya berdasarkan dari aksi buruh saja, tetapi dinilai dari aksi lainnya juga, dan ada penilaian berdasarkan kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan, pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan yang independen.

Indikator kebebasan sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017-2020 mengalami kenaikan maupun penurunan, tetapi skor indikator kebebasan sipil ini dikategorikan sangat bagus karena skor yang didapatkan pada tahun 2017 mendapatkan skor 87,73; tahun 2018 mendapatkan skor sebesar 95,09; tahun 2019 mendapatkan skor 91,01; dan tahun 2020 mendapatkan skor 93,27.

Aksi buruh yang dilakukan di Jakarta tahun 2017-2018 menuntut mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), upah sektoral, dan sistem kerja kontrak.

Aksi buruh berpengaruh dalam penilaian skor indikator Indeks Demokrasi Indonesia, tetapi penilaian skor Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta tidak hanya dilihat dari aksi buruh saja, tetapi dilihat dari berbagai aksi yang dilaksanakan di Jakarta sebagai bagian dari indikator kebebasan sipil yang memiliki indikator kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, selain kedua indikator tersebut juga ada indikator lainnya seperti kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

Indikator hak-hak politik dalam Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017-2020 mengalami kenaikan maupun penurunan, tetapi skor indikator hak-hak politik ini dikategorikan bagus walaupun terjadi penurunan pada tahun 2018 skor yang didapatkan menjadi 75,43 yang pada tahun 2017 mendapatkan skor 80,86, tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 83,86; dan tahun 2020 mendapatkan skor 84,95. Indikator hak-hak politik memiliki dua indikator yang berkaitan dengan aksi buruh, yaitu: Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, dan pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Aksi buruh di DKI Jakarta berpengaruh dalam indikator hak-hak politik yaitu pada indikator demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan walaupun indikator ini juga dilihat dari aksi-aksi lainnya yang dilakukan di Jakarta. Aksi buruh yang terjadi pada tahun 2019-2020 merupakan aksi besar yang sangat mempengaruhi penilaian pada indikator demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasann, tetapi indikator pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan mendapatkan skor 100 dari tahun 2017-2020. Pemprov responsif terhadap aksi buruh dan melakukan konsolidasi dengan pihak buruh. Pemprov juga menanggapi pengaduan masyarakat baik *online* maupun *offline*. Penilaian skor Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada indikator hak-hak politik tidak hanya dilihat dari demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, dan pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan saja, tetapi dilihat dari indikator hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan, dan pengambilan Keputusan dan pengawasan pemerintahan.

Indikator lembaga demokrasi dalam Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017-2020 mengalami kenaikan maupun penurunan, tetapi

skor indikator lembaga politik ini dikategorikan sangat bagus karena skor yang didapatkan pada tahun 2017 mendapatkan skor 87,12; tahun 2018 mendapatkan skor sebesar 87,82; tahun 2019 mendapatkan skor 91,89; tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan tetapi tidak drastis menjadi 90,86.

Aksi buruh tidak mempengaruhi dalam penilaian indikator ini, karena tuntutan yang mereka suarakan dalam aksi selalu ditanggapi oleh Pemprov, dan pihak buruh dan Pemprov melakukan konsolidasi dengan baik, sehingga pihak buruh tidak melaporkan tuntutan mereka ke PTUN. Penilaian skor Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada indikator lembaga demokrasi tidak hanya dilihat dari kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh Keputusan PTUN, tetapi dilihat juga dari indikator pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan yang independen.

## **V.2 Saran**

### **V.2.1 Saran Praktis**

DKI Jakarta sebagai barometer demokrasi di Indonesia sering kali menjadi tempat untuk melakukan aksi demonstrasi dalam skala kecil maupun besar salah satunya aksi buruh yang menuntut mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP). Pemprov dalam menangani aksi-aksi di Jakarta khususnya aksi buruh sudah bagus dengan menerima kritik, dan merespon tuntutan buruh. Hal ini yang membuat Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta berada di peringkat pertama selama 2017-2020. Saran yang ingin penulis sampaikan bahwa Pemprov dapat mengendalikan aksi yang berskala besar dan aksi yang dapat menimbulkan keributan dengan lebih baik lagi, pemprov bisa berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk tidak menggunakan kekerasan pada saat aksi berlangsung, masyarakat yang melakukan aksi dengan damai, dan peran media juga berperan penting dalam pencapaian skor Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

### **V.2.2 Saran Akademik**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi akademik untuk mengetahui bagaimana hubungan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI

Jakarta terhadap tuntutan buruh di DKI Jakarta. Hal ini juga perlu dilakukannya penelitian lanjutan yang membahas indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia secara keseluruhan dan penelitian mengenai Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi lain sebagai perbandingan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi DKI Jakarta.